

TUGAS KELOMPOK

STUDI KASUS KECAMATAN BANJARSARI



NAMA ANGGOTA :

1. Adhy Timur Hartanto, S.Tr.Kes.
2. Chatarina Dina Eka Wahyuni, S.E.
3. Choiroh Umatun, S.I.P.
4. Dal Sugiarto, S.H.
5. Fidensius Andam, A.Md.
6. Haridayano, S.E.
7. Lasmiyati, S.M.
8. Oryza Yuliarto, S.E.
9. R. Kurniawan Sapta Margana, A.Md.
10. Rahayu, S.TP
11. Sariyani, S.M.
12. Sri Pujiasih, S.M.
13. Sugi Suryanto, S.T.
14. Sujiyati, S.E.
15. Supangat Infantri Jaya, S.A.P.
16. Susi Rahmayani, S.H.
17. Wadji Pranowo, S.Sos.
18. Yenni Yunita, S.Sos., M.A.P.
19. Yuri Akhmad Satari, A.Md.
20. Yustinus Tambi, S.Ak

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025**

II. DAFTAR ISI

I	JUDUL.....	1
II.	DAFTAR ISI.....	1
III.	DESKRIPSI PROFIL LOKUS KECAMATAN BANJARSARI.....	1
IV.	PROFIL KINERJA ORGANISASI.....	2
V.	DIAGNOSA MASALAH.....	3
VI.	DESAIN SOLUSI.....	4
	a. Gagasan Perubahan.....	4
	b. Cakupan Manfaat.....	4
	c. Rencana Aksi Solutif dengan Prinsip SMART.....	4
	d. Aspek pendukung upaya penyelesaian masalah Pelayanan Publik.....	6
	i. Pemanfaatan IT.....	6
	ii. Manajemen Mutu untuk antisipasi risiko dan masalah yang timbul.....	6
	iii. Pemberdayaan masyarakat.....	7
	iv. Strategi Planning & Budgeting.....	7
VII.	ADVOKASI.....	7
VIII.	LESSONS LEARNT KEPEMIMPINAN DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN.	8
	a. Lessons Learnt Kepemimpinan.....	8
	b. Refleksi Pembelajaran.....	9
IX.	DOKUMENTASI.....	10

III. DESKRIPSI PROFIL LOKUS KECAMATAN BANJARSARI

Kecamatan Banjarsari adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta dan merupakan kecamatan dengan kelurahan terbanyak di kota Surakarta. Kecamatan ini merupakan satu-satunya kecamatan yang sebelum kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari wilayah kota raja dari Kadipaten Praja Mangkunegaran sedangkan empat kecamatan lainnya merupakan wilayah dari kota raja Kasunanan Surakarta. Kecamatan Banjarsari memiliki banyak objek penting bagi Sejarah, kebudayaan dan pariwisata Kota Surakarta, antara lain Keraton Mangkunegaran, Stadion Manahan, Stasiun Solo Balapan yang merupakan Stasiun terbesar di Kota Surakarta yang melayani rute ke dan dari berbagai kota di pulau Jawa, terminal bus Tirtonadi, Pasar lagi dan lain sebagainya.

Kecamatan Banjarsari melalui penyusunan buku profil Kecamatan Banjarsari ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pembangunan, kultur masyarakat serta perangkat pemerintahan pada Kecamatan Banjarsari.

Kecamatan Banjarsari secara administrasi terbagi kedalam 15 kelurahan, banyaknya kelurahan di kecamatan ini tak luput dari pengaruh luas wilayah Kecamatan Banjarsari yang mencapai 15,26 km² dan dengan presentase 33,65% dari total luas kota Surakarta, mengalahkan kecamatan tetangganya yaitu Kecamatan Jebres yang memiliki luas 12,58 km² menjadikan Kecamatan Banjarsari sebagai kecamatan terluas di Kota Surakarta. Secara geografis, Kecamatan Banjarsari terletak di cekungan yang dialiri oleh Kali Pepe, anak sungai yang bermuara ke Bengawan Solo. Selain itu di bagian utara terdapat sodetan pengendali banjir yang debitnya diatur di pintu air Tirtonadi. Banjarsari sendiri berbatasan dengan empat kecamatan di Surakarta dan dua kecamatan lain dari kabupaten yang berbeda. Jarak ke pusat kota 7,5km dengan tinggi wilayah 0-100 mdpl.

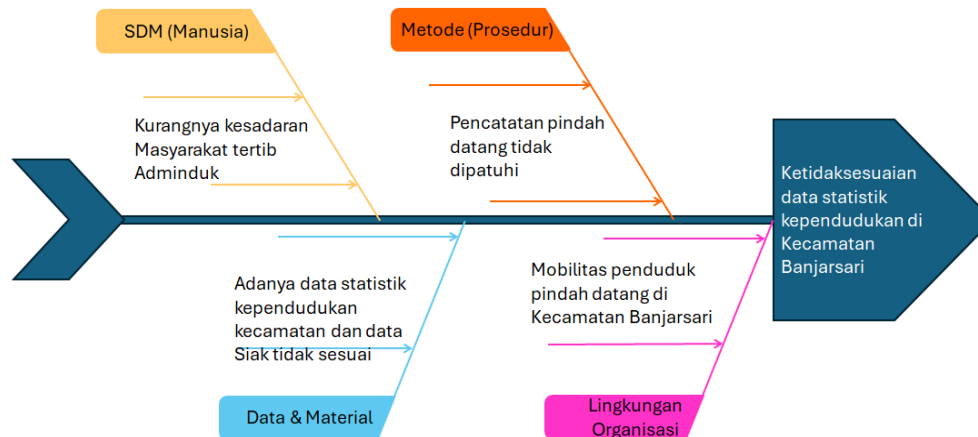
IV. PROFIL KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Banjarsari sebagai salah satu kecamatan terbesar di Kota Surakarta memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja organisasi kecamatan pada dasarnya mencerminkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pembangunan di tingkat kewilayahan.

Namun demikian, kinerja organisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data antara sistem inovasi dengan basis data SIAK yang berpotensi menimbulkan disparitas statistik. Secara akademik, profil kinerja organisasi Kecamatan Banjarsari menunjukkan dinamika transisi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih modern. Implementasi inovasi Mbak Sri Cantik tidak hanya meningkatkan indikator kinerja teknis, tetapi juga membangun legitimasi organisasi dalam kerangka good governance, yakni pelayanan yang efektif, transparan, partisipatif dan berpihak pada warga. Dengan demikian,

Kecamatan Banjarsari dapat dikatakan telah menunjukkan kapasitas organisasi yang progresif, meskipun tetap diperlukan strategi konsolidasi data, penguatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi agar kinerja organisasi lebih berkelanjutan dan inklusif.

v. DIAGNOSA MASALAH



Gambar 1 - Fishbone

Terdapat ketidaksesuaian angka yang cukup signifikan antara data *Mbak Sri Cantik* (sebanyak +/- 153.000 jiwa) dengan data SIAK (sebanyak +/- 183.000 jiwa).

Data *Mbak Sri Cantik* berbasis data NIK dan domisili berbasis data Geospasial. Angka pada *Mbak Sri Cantik* menunjukkan data penduduk dengan fakta domisili di Kecamatan Banjarsari. Sehingga dapat disimpulkan selisih data (+/- 30.000 jiwa) adalah penduduk Kecamatan Banjarsari yang tercatat secara kependudukan, tetapi tidak berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Hal ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut: Aspek SDM, rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan menyebabkan banyak peristiwa pindah datang tidak tercatat. Sisi prosedur, kepatuhan terhadap pencatatan masih lemah sehingga data tidak sinkron dengan SIAK. Sementara itu, dari aspek data dan material, perbedaan metode dan waktu pemutakhiran antara kecamatan dan sistem pusat menimbulkan selisih angka. Faktor lingkungan organisasi, yakni tingginya mobilitas penduduk di wilayah perkotaan, memperburuk dinamika ini.

Dengan demikian, persoalan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kepatuhan prosedural, serta integrasi dan sinkronisasi data kependudukan secara berkelanjutan.

VI. **DESAIN SOLUSI**

Alternatif solusi inovatif dalam merespons ketidaksesuaian data statistik kependudukan di Kecamatan Banjarsari dapat dilakukan melalui strategi edukasi dan pendampingan masyarakat serta penguatan koordinasi kelembagaan. Sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya pembaruan data kependudukan serta kepatuhan melaporkan perubahan status, seperti pindah datang maupun peristiwa kependudukan lainnya. Upaya ini diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Dinas Dukcapil untuk memperoleh akses data SIAK yang lengkap dan terkini. Setelah itu, proses penyandingan (data reconciliation) antara data SIAK dan inovasi *Mbak Sri Cantik* menjadi langkah kunci untuk memastikan konsistensi data. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga membangun budaya tertib administrasi kependudukan yang berkelanjutan di masyarakat.

a. **Gagasan Perubahan**

Gagasan perubahan yang diajukan adalah **penyusunan profil data kependudukan** di Kecamatan Banjarsari sebagai dasar kajian dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Profil ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat, valid, dan relevan.

b. **Cakupan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari gagasan perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Kecamatan Banjarsari, tetapi juga memberikan kontribusi bagi stakeholder lain. Data kependudukan yang valid akan menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik dalam bidang pelayanan publik, pembangunan ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat.

c. **Rencana Aksi Solutif dengan Prinsip SMART**

- i. **Spesifik (Specific):** Melakukan sosialisasi kewajiban lapor pindah bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.
- ii. **Terukur (Measurable):** Keberhasilan diukur melalui kesesuaian antara data statistik kependudukan pada inovasi *Mbak Sri Cantik* dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- iii. **Dapat Diterima (Acceptable):** Aksi dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat yang dapat diterima serta dijalankan oleh perangkat kecamatan dan stakeholder terkait.
- iv. **Relevan (Relevant):** Data statistik kependudukan yang akurat akan mendukung kebijakan lintas sektor, sehingga memberikan dampak positif pada perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- v. **Batas Waktu (Time Bound):** Sinkronisasi data kependudukan antara *Mbak Sri Cantik* dan SIAK dilaksanakan secara berkala, yaitu setiap **6 bulan sekali**, guna menjamin keberlanjutan akurasi data.

Tabel 1 – Rencana Aksi Solutif dengan prinsip SMART

Prinsip SMART	Deskripsi Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
Specific (Spesifik)	Melakukan sosialisasi kewajiban lapor pindah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana dan jumlah peserta yang hadir.	Setiap ada program sosialisasi di kecamatan/kelurahan.
Measurable (Terukur)	Menyandingkan data statistik kependudukan <i>Mbak Sri Cantik</i> dengan data SIAK.	Persentase kesesuaian data antara <i>Mbak Sri Cantik</i> dan SIAK.	Setelah kegiatan sinkronisasi data.
Acceptable (Dapat Diterima)	Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dalam pelaporan perubahan status kependudukan.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.	Berlangsung sepanjang tahun melalui kegiatan fasilitasi.
Relevant (Relevan)	Menghasilkan data statistik kependudukan yang akurat sebagai dasar kebijakan bagi stakeholder lain.	Data profil kependudukan digunakan dalam penyusunan kebijakan lintas sektor.	Setiap penyusunan program/kebijakan.

Prinsip SMART	Deskripsi Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
Time Bound (Batas Waktu)	Melakukan sinkronisasi data kependudukan antara <i>Mbak Sri Cantik</i> dan SIAK secara berkala.	Terselenggaranya sinkronisasi data minimal 2 kali dalam setahun.	Setiap 6 bulan sekali.

d. Aspek pendukung upaya penyelesaian masalah Pelayanan Publik

i. Pemanfaatan IT

Upaya penyelesaian masalah pelayanan publik, khususnya terkait ketidaksesuaian data kependudukan di Kecamatan Banjarsari, sangat ditentukan oleh ketersediaan aspek pendukung yang terintegrasi. **Pertama, infrastruktur teknologi** seperti jaringan internet stabil, perangkat komputer memadai, dan listrik cadangan menjadi syarat mutlak agar pelayanan berbasis sistem tidak terganggu. **Kedua, aplikasi dan sistem** berupa pemanfaatan SIAK terpusat dan dukungan *bridging system* memungkinkan integrasi data yang cepat dan akurat, sekaligus meminimalisasi risiko duplikasi melalui validasi otomatis. **Ketiga, aspek SDM** berperan vital, di mana operator harus dibekali pelatihan teknis, didampingi tim IT, serta ditunjang admin khusus agar input data konsisten. **Keempat, manajemen dan regulasi** dibutuhkan untuk menjamin kepatuhan, misalnya melalui SOP input data maksimal 1x24 jam, rekonsiliasi rutin, dan dukungan regulasi formal seperti Peraturan Wali Kota. **Kelima, keamanan data** harus dijaga melalui pembatasan akses, backup otomatis, dan perlindungan privasi sesuai UU. **Keenam, dukungan lingkungan dan stakeholder** memperkuat keberlanjutan, terutama lewat kolaborasi dengan Disdukcapil, RT/RW, kelurahan, serta organisasi masyarakat.

Dengan demikian, aspek pendukung ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian masalah tidak semata ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh kapasitas SDM, kepastian regulasi, perlindungan data, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan yang

menyeluruh ini menjadi dasar penting bagi terciptanya pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

ii. Manajemen Mutu untukantisipasi risiko dan masalah yang timbul

Manajemen mutu dalam pelayanan publik berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mengantisipasi potensi risiko, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, keterlambatan pengantaran dokumen, maupun kendala teknis IT. Pendekatan manajemen mutu dilakukan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, monitoring berkala, serta penerapan *continuous improvement*. Dengan demikian, setiap masalah yang muncul tidak hanya diselesaikan secara reaktif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan (*lesson learnt*).

iii. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan inovasi pelayanan publik. Dalam konteks Banjarsari, masyarakat dilibatkan aktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan (lahir, mati, pindah, datang) melalui mekanisme RT/RW, dasawisma, atau aplikasi digital sederhana. Partisipasi warga tidak hanya mempercepat updating data, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan paradigma *collaborative governance*, di mana masyarakat tidak sekadar penerima layanan, melainkan juga mitra dalam penyelenggaraan layanan publik.

iv. Strategi Planning & Budgeting

Perencanaan dan penganggaran (planning & budgeting) yang strategis diperlukan agar inovasi pelayanan publik dapat berjalan berkelanjutan. Strategi ini mencakup alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur IT, pelatihan SDM, biaya operasional pengantaran dokumen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kecamatan perlu menyusun *planning* yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sinkron dengan prioritas pembangunan kota. Dengan demikian, inovasi seperti

Mbak Sri Cantik tidak hanya bersifat insidental, tetapi masuk ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

VII. ADVOKASI

Permasalahan ketidaksesuaian data kependudukan antara inovasi *Mbak Sri Cantik* dengan *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)* menuntut langkah advokasi yang sistematis dan berbasis kolaborasi. Advokasi ini dilakukan agar penyelesaian masalah tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga memperoleh dukungan kebijakan, regulasi, dan partisipasi lintas pemangku kepentingan.

Tabel 2- Stakeholder dan Strategi Komunikasi

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Tingkat Pengaruh	Strategi Komunikasi
Camat Banjarsari	Pengambil keputusan utama, pengawas inovasi	Tinggi (kepentingan pengendalian data dan keberhasilan inovasi)	Tinggi	Komunikasi formal, laporan rutin, rapat koordinasi
Disdukcapil Kota Surakarta	Pemilik data SIAK, regulator kependudukan	Sangat tinggi (basis data nasional)	Tinggi	Koordinasi teknis, MoU, rapat integrasi data
Kelurahan	Pelaksana pelayanan di tingkat masyarakat	Tinggi (kontak langsung dengan warga)	Sedang	Rapat koordinasi bulanan, grup komunikasi WhatsApp/Telegram
RT/RW & Dasawisma	Penghubung langsung dengan masyarakat	Sedang (pendataan awal, sosialisasi)	Sedang	Sosialisasi tatap muka, media cetak (leaflet), aplikasi pesan singkat
Masyarakat Pemohon Layanan	Penerima manfaat utama	Tinggi (akses layanan cepat & mudah)	Rendah–Sedang	Media sosial, brosur, layanan call center/WhatsApp
Petugas Operator SIAK	Penginput dan pengelola data	Tinggi (validasi data)	Sedang	Pelatihan teknis, briefing harian, manual kerja
Petugas Antar Dokumen	Pelaksana layanan antar	Sedang (serah-terima dokumen)	Rendah	SOP tertulis, briefing mingguan
Pemerintah Kota (Bagian Organisasi/Setda)	Monitoring inovasi publik	Sedang–Tinggi (evaluasi kinerja)	Tinggi	Laporan resmi, presentasi kinerja
Media Lokal & LSM	Penyebarluasan informasi, kontrol sosial	Sedang	Rendah–Sedang	Siaran pers, publikasi capaian, forum diskusi

VIII. LESSONS LEARNT KEPEMIMPINAN DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN

a. **Lessons Learnt Kepemimpinan**

i. **Kepemimpinan Kolaboratif**

- Permasalahan ketidaksesuaian data kependudukan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor (kecamatan, Disdukcapil, kelurahan, hingga RT/RW).
- Pemimpin berperan sebagai *bridge builder* yang menghubungkan berbagai aktor untuk mencapai kesamaan data.

ii. **Kepemimpinan Visioner**

- Pemimpin mampu melihat pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.
- Visi ini diterjemahkan dalam langkah inovatif, yakni melalui penguatan sistem Mbak Sri Cantik agar selaras dengan SIAK.

iii. **Kepemimpinan Partisipatif**

- Keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.
- Pemimpin mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi.

iv. **Kepemimpinan Adaptif**

- Pemimpin perlu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan sistem integrasi data.
- Adaptasi ini juga mencakup penyesuaian strategi dalam menghadapi resistensi atau rendahnya kesadaran masyarakat.

b. **Refleksi Pembelajaran**

i. **Pentingnya Data sebagai Basis Kebijakan**

- Data kependudukan yang akurat merupakan kunci bagi kebijakan publik yang tepat sasaran. Ketidaksesuaian data dapat berdampak pada kesalahan perencanaan pembangunan.

ii. **Teknologi sebagai Enabler, Bukan Satu-satunya Solusi**

- Penguatan infrastruktur IT memang penting, namun keberhasilan sinkronisasi tetap bergantung pada kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menginput data.

iii. Perubahan Butuh Dukungan Regulasi dan Budaya Organisasi

- Tanpa regulasi yang kuat (misalnya Peraturan Wali Kota) dan budaya organisasi yang konsisten, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan.

iv. Pembelajaran Kepemimpinan

- Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menggabungkan pendekatan teknis, manajerial, dan sosial dalam menyelesaikan masalah.
- Refleksi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang transformatif dan inklusif lebih mampu memastikan inovasi bertahan dan memberi manfaat nyata.

IX. DOKUMENTASI



X. VIDEO

<https://drive.google.com/file/d/1UIW1Va0X1pt1xBgnvP-Y8AUVuHtw4qoU/view?usp=sharing>